

# LAPORAN TRIWULAN III

PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



20  
25



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga *Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Triwulan III Tahun Anggaran 2025* dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini berisi informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai rencana.

Harapan kami, laporan monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi bahan masukan yang berharga dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan maupun kendala dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Selain itu, semoga laporan ini juga dapat mendukung pengembangan sistem pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum pada masa mendatang.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum,



Reni Ahiantini  
NIP.196910181996032002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	4
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
<b>BAB II: PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM .....</b>	<b>5</b>
2.1 KEBIJAKAN INTERNAL TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI UU KIP DI TAHUN 2025 .....	5
2.2 KEGIATAN INTERNAL TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI UU KIP PADA TAHUN 2025 .....	6
2.3 REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 .....	12
2.4 REKAPITULASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK.....	13
2.5 KONDISI LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	16
2.6 UPAYA INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	17
2.7 SURVEI LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	18
<b>BAB III: KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI.....</b>	<b>20</b>
3.1 KENDALA LAYANAN INFORMASI LINGKUP UNIT ORGANISASI DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM.....	20
3.2 KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI LINGKUP UNIT KERJA .....	20
<b>BAB IV: REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI .....</b>	<b>21</b>
4.1 REKOMENDASI .....	21
4.2 TINDAK LANJUT .....	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi juga menjadi sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun Badan Publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Badan Publik memiliki kewajiban membuka akses informasi bagi masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

Melalui prinsip keterbukaan, Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Sejak tahun 2015, Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian PUPR, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik serta pengelolaan struktur organisasi PPID.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan laporan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini memiliki maksud untuk mendokumentasikan pelaksanaan kewajiban Badan Publik dalam memberikan layanan informasi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Adapun tujuan laporan ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
2. Menjadi sarana evaluasi dan monitoring atas kinerja layanan informasi publik.
3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM**

#### **2.1 Kebijakan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP di Tahun 2025**

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan internal yang memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penetapan standar layanan informasi publik. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penajaman dan memperkaya informasi pada 3 (tiga) klasifikasi informasi di lingkungan Pekerjaan Umum yang telah disusun sejak tahun 2015 yaitu:

- Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
- Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Sebagai upaya penguatan PPID tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga terus melakukan sosialisasi atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pekerjaan Umum.

2.1.1 Adapun beberapa kebijakan internal yang merupakan implementasi UU KIP Tahun 2025 adalah:

1. Telah terdapat SK PPID DJPI Nomor 56/KPTS/Dp/2024 Tahun 2024 Tahun 2024 Pembentukan TIM Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Telah terdapat SK SP4N Lapor di lingkungan DJPI Nomor 79/KPTS/Dp/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.
3. Telah terdapat SK PIC pengelolaan Aplikasi Nomor 10 /KPTS/Ps/2024 Tahun 2024 Pembentukan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Telah terdapat SK Standar Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Perumahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan.

## 5. SOP Sistem informasi Aplikasi Pengaduan.

### 2.2 Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP pada Tahun 2025

- Pengelolaan Website dan Media Sosial

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki **website resmi** yang terintegrasi dengan portal Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu melalui alamat pembiayaan.pu.go.id.

Melalui website ini, DJPI menyampaikan berbagai informasi terkait:

- Profil organisasi dan struktur unit kerja,
- Kebijakan, regulasi, dan program kerja pembiayaan infrastruktur,
- Informasi publik terkait layanan, termasuk mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),
- Data pendukung dan publikasi,
- Layanan pengaduan serta permohonan informasi publik.

Seluruh data dan informasi yang tersedia di website diperbaharui secara berkala maupun sesuai kebutuhan, sebagai wujud komitmen DJPI dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### Website



Selain melalui website, DJPI juga memanfaatkan berbagai **media sosial resmi** sebagai sarana penyebaran informasi dan interaksi dengan masyarakat, antara lain:

- **Instagram:** [@pu\\_djpi](#)
- **X (Twitter):** [@pu\\_djpi](#)
- **TikTok:** [@pu\\_djpi](#)
- **Facebook:** [Pembiayaan Infrastruktur PU](#)
- **YouTube Channel:** [@pu\\_djpi](#)

Pemanfaatan media sosial ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat interaksi publik terhadap program dan layanan DJPI.

Selain itu, setiap bulan Tim Komunikasi Publik DJPI secara rutin mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan timeline dan strategi pengelolaan media sosial, termasuk penyusunan materi publikasi yang menampilkan capaian dan kinerja masing-masing unit kerja. Rapat ini dihadiri oleh Penanggung Jawab (PIC) dari setiap unit kerja guna memastikan keselarasan pesan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik.

#### **TIMELINE KOMUNIKASI PUBLIK DJPI TANGGAL 11 JULI-7 AGUSTUS 2025**

<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Materi Posting</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Disposisi</b>	<b>Format</b>
<b>Kamis/10 Juli 2025</b>	PU 608 PCO RI	Final Posted	Team Kompu	Carousel Poto
<b>Jumat/11 Juli 2025</b>	Video part 2 Persampahan PPICK	Final Posted	Tim Kompu dan Nurul PPISDA	Poto
Sabtu/12 Juli 2025	-	-	-	-
<b>Minggu/13 Juli 2025</b>	Video Penandatanganan ZI DJPI	Final Posted	Team Kompu	Reels
<b>Senin/14 Juli 2025</b>	Profil Proyek KPBU PPIBM (Sentul- Karawang)	Syuting materi PPISDA: PERAN KPBU DALAM TRANSISI ENERGI LISTRIK	Team Kompu dan (Talent: Hendri PPISDA)	Poto/Carousel
Selasa/ 15 Juli 2025	-	Syuting Materi PPISDA: Proses Lelang KPBU Pembangkit Listrik	Team Kompu (Talent: Taufik PPISDA)	-
Rabu/16 Juli 2025	Internalisasi PPISDA	Cadangan konten untuk profil proyek KPBU Leuwikeris PPISDA	Team Kompu dan PPISDA	Poto/Carousel
Kamis/17 Juli 2025	-	Syuting Quiz DJPI	-	-
Jumat/18 Juli 2025	Profil Proyek Manggar PPICK	-	Team Kompu dan Dit. PPIBM	Poto/Carousel
<b>Sabtu/19 Juli 2025</b>	Video materi PPISDA: PERAN KPBU DALAM TRANSISI ENERGI	-	Team Kompu dan PPISDA	Reels
Minggu/20 Juli 2025	Kuis OVO	-	Team Kompu	Reels

### TIMELINE KOMUNIKASI PUBLIK DJPI TANGGAL 7-31 AGUSTUS 2025

Hari/Tanggal	Materi Posting	Keterangan	Disposisi	Format
Kamis/7 Agustus 2025	-	-	-	-
Jumat/8 Agustus 2025	TPAS Manggar	Proses Revisi/Syuting Quiz	Tim Kompu dan Klara PPICK	Poto
Sabtu/9 Agustus 2025	Quis DJPI	-	Team Kompu	Reels
Minggu/10 Agustus 2025	-	-	-	-
Senin/11 Agustus 2025	Materi Edukasi PSSPP	Syuting Materi Edukasi PPIBM	Team Kompu dan PSSPP	Disarankan Video
Selasa/ 12 Agustus 2025	-	-	-	-
Rabu/13 Agustus 2025	Materi Edukasi/Proyek KPBUPPIBM	Final Posted	Team Kompu dan Aisyah PPIBM	Reels
Kamis/14 Agustus 2025	Hari Pramuka Nasional	-	Team Kompu	Poto
Jumat/15 Agustus 2025	Profil Tokoh Pahlawan 1	Tokoh Pahlawan Kemerdekaan 1	Team Kompu	Poto/Reels
Sabtu/16 Agustus 2025	Profil Tokoh Pahlawan 2	Tokoh Pahlawan Kemerdekaan 2	Team Kompu	Poto/Reels
Minggu/17 Agustus 2025	Hari Proklamasi RI ke 80	-	Team Kompu	Poto/Reels
Senin/18 Agustus 2025	Materi SMAP	Syuting Materi Edukasi /Proyek KPBUPPISDA	Team Kompu	Carousel poto
Selasa/19 Agustus 2025	-	-	-	-
Rabu/20 Agustus 2025	Materi Zona Integritas (ZI)	Syuting Quiz DJPI & Materi Edukasi /Proyek KPBUPPICK	Team Kompu	Reels
Kamis/21 Agustus 2025	-	-	-	-
Jumat/22 Agustus 2025	Materi Edukasi /Proyek KPBUPPISDA	-	Team Kompu dan Nurul PPISDA	Reels
Sabtu/23 Agustus 2025	Quiz DJPI	-	Team Kompu	Reels
Minggu/24 Agustus 2025	-	-	-	-

### TIMELINE KOMUNIKASI PUBLIK DJPI TANGGAL 11-30 SEPTEMBER 2025

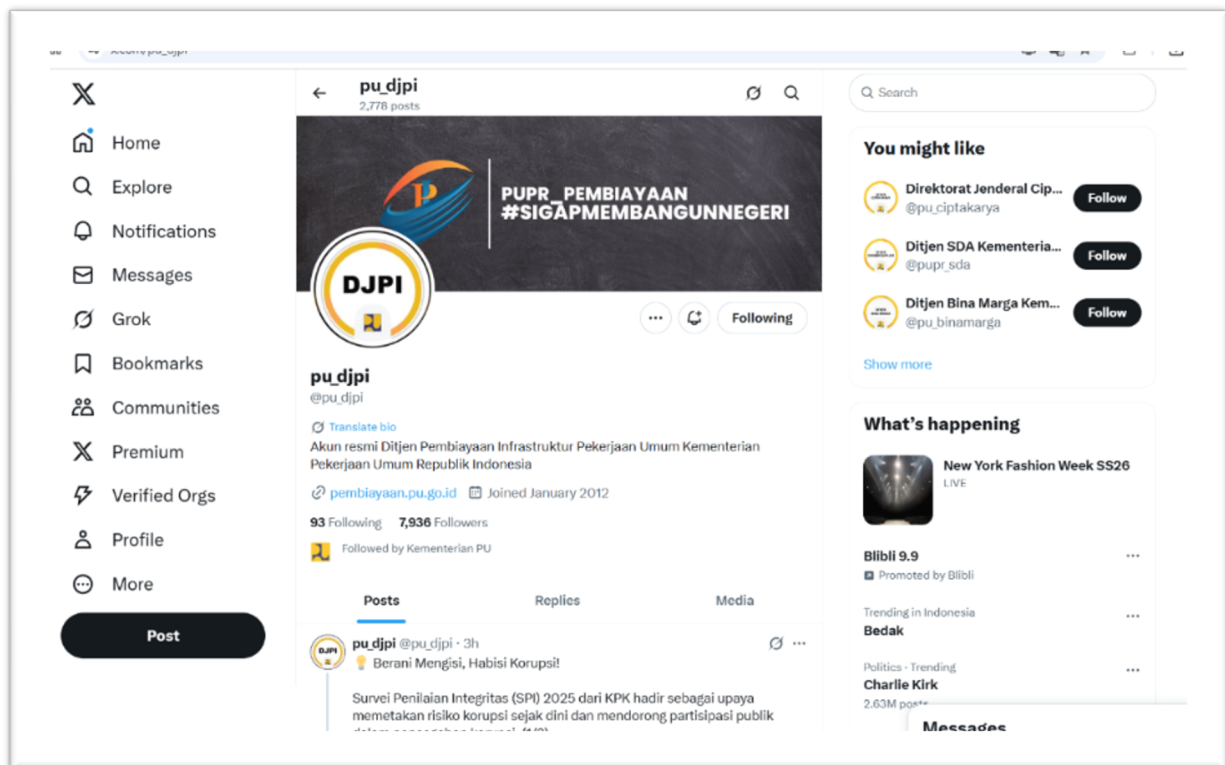
Hari/Tanggal	Materi Posting	Keterangan	Disposisi	Format
Rabu/10 September 2025	Liputan Focus Group Discussion (FGD) PPICK	Rapat KOMPU dan Tim PIC Medsos	Team Kompu	Carousel Poto
Kamis/11 September 2025	-	Syuting PPICK (Market Sounding)	-	-
Jumat/12 September 2025	Materi Edukasi PSSPP	Syuting Quiz	Novi PSSPP	Reels
Sabtu/13 September 2025	Quis DJPI	-	Team Kompu	Reels
Minggu/14 September 2025	-	-	-	-
Senin/15 September 2025	Materi Edukasi PPISDA	Syuting materi Edukasi PPIBM	Nurul PPISDA	Poto
Selasa/16 September 2025	-	-	-	-
Rabu/17 September 2025	Video PPICK Market Sounding	-	Team Kompu dan Klara PPICK	Reels
Kamis/18 September 2025	-	-	-	-
Jumat/19 September 2025	Video Materi Edukasi PPIBM	-	Aisyah PPIBM	Poto/Reels
Sabtu/20 September 2025	-	-	-	-
Minggu/21 September 2025	-	-	-	-
Senin/22 September 2025	Materi SMAP	Syuting materi Proyek PPISDA dan KPBUPSSPP	Team Kompu	Carousel poto
Selasa/23 September 2025	-	-	-	-
Rabu/24 September 2025	Materi Zona Integritas (ZI)	-	Team Kompu	Reels
Kamis/25 September 2025	-	-	-	-
Jumat/26 September 2025	Materi Edukasi /Proyek KPBUPPISDA	-	Team Kompu dan Nurul PPISDA	Reels
Sabtu/27 September 2025	Quiz DJPI	-	Team Kompu	Reels

### Timeline Media Sosial DJPI Bulan Juli-September Tahun 2025

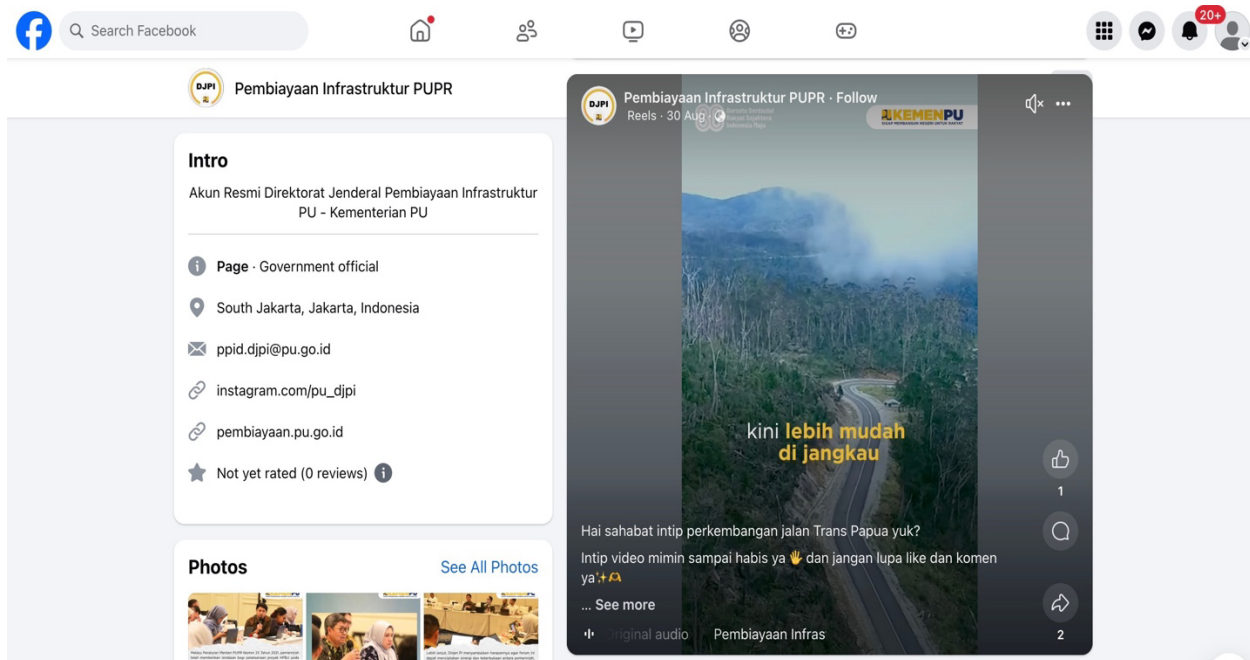




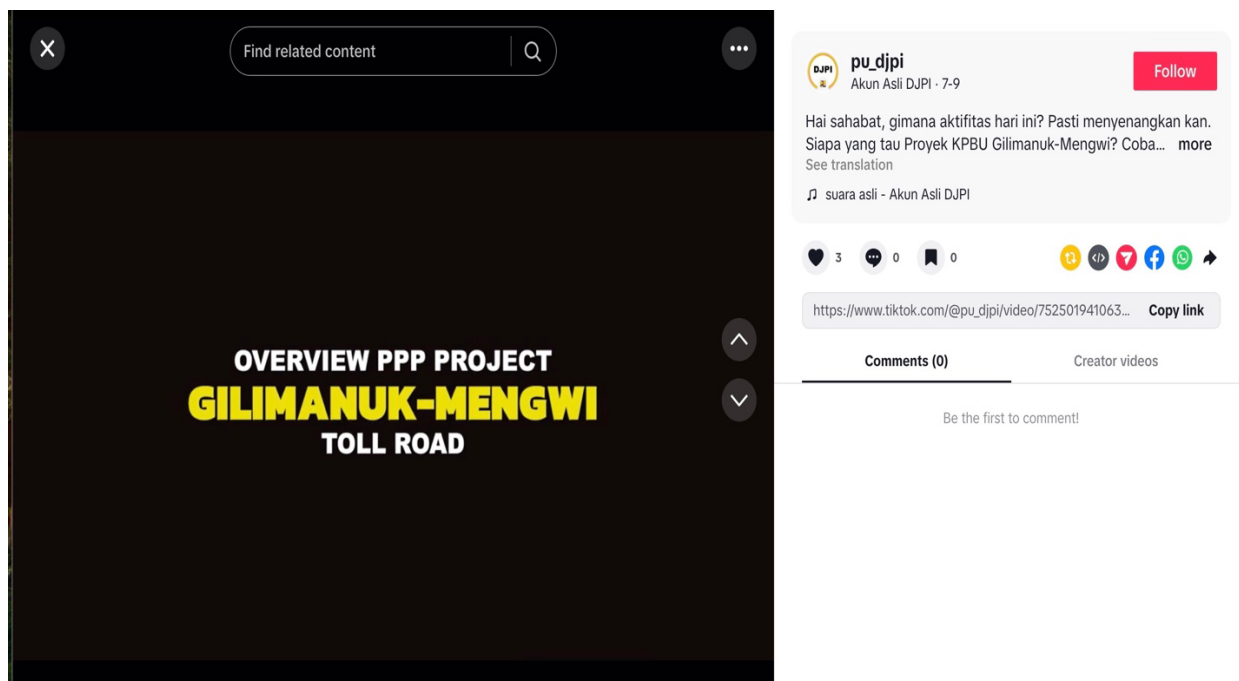
Instagram DJPI



X DJPI



Facebook DJPI



Tiktok DJPI



**Penerapan SMAP ISO 37001:2016 di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur**



**Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pek...**  
770 subscriber

Subscribe



3



Bagikan



Download



48 x ditonton 18 Sep 2025

Youtube DJPI

## 2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

### Laporan Layanan Informasi Triwulan III Tahun 2025

1. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui aplikasi SP4N-LAPOR sebanyak satu pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Juli	0	0	0
2.	Agustus	0	0	0
3.	September	1	0	1

2. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui media sosial sebanyak dua pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Juli	1	0	1
2.	Agustus	0	0	0
3.	September	1	0	1

3. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui datang langsung/persuratan tidak terdapat penerimaan pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Juli	0	0	0
2.	Agustus	0	0	0
3.	September	0	0	0

4. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui E-mail sebanyak empat pengaduan, dengan status:

No	Bulan	Status Selesai	Status dalam Proses	Total Pengaduan
1.	Juli	2	0	2
2.	Agustus	2	0	2
3.	September	0	0	0



Seluruh pengaduan dan permohonan informasi yang masuk ke DJPI telah dikelompokkan berdasarkan unit kerja terkait, guna mempermudah proses tindak lanjut dan evaluasi pelayanan. Rincian klasifikasi pengaduan maupun permohonan informasi per unit kerja adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Pengaduan	Jenis Pengaduan
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Jafung API
2.	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	4	Informasi KPBU
3.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Sumber Daya Air	0	-
4.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Bina Marga	2	Informasi KPBU Bina Marga
5.	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Cipta Karya	0	-

## 2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik dilakukan dengan klasifikasi sesuai ketentuan, yaitu:

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala  
di Kementerian Pekerjaan Umum

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>UMUM</b>								
<u>Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA</u>								
1	Seluruh Unit organisasi	Profil Unit Kerja	Seluruh unit eselon II	Seluruh unit eselon II	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy dan Hardcopy	5 tahun	
2	Seluruh Unit organisasi	Daftar Pejabat Struktural dan/ atau fungsional	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan, di Jakarta	Softcopy dan Hardcopy	1 tahun	
3	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Setiap tahun, Jakarta	Softcopy dan Hardcopy	2 tahun	
4	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (E-Procurement)	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Berkala, Jakarta	Softcopy	2 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>UMUM</b>								
<b>Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA</b>								
5	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Audited)	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	5 tahun	
6	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan laporan akses (pelayanan) informasi publik	Biro Komunikasi Publik dan Pelaksana PPID	Biro Komunikasi Publik dan Pelaksana PPID	Setiap enam bulan sekali, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	2 tahun	
7	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang agenda kegiatan Kementerian yang telah, sedang dan akan dijalankan	Masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan agenda kegiatan, di Jakarta	Softcopy/ Hardcopy	2 tahun	
8	Seluruh Unit organisasi	Publikasi dan dokumentasi kegiatan bidang PUPR (Jurnal, Buletin, brosur, pemberitaan website, press release)	Masing-masing unit organisasi/UPT	Masing-masing unit organisasi/UPT	Setiap ada kegiatan dan tempat menyesuaikan	Softcopy	1 tahun	
9	Seluruh Unit organisasi	Program-program prioritas lingkup Kementerian PUPR	Masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	5 tahun	

**Informasi yang wajib tersedia setiap saat  
di Kementerian Pekerjaan Umum**

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>UMUM</b>								
<b>Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT</b>								
10	Seluruh Unit organisasi	Agenda Kerja Pimpinan dan Pejabat Eselon I	Sekretariat masing-masing unit organisasi	Sekretariat masing-masing unit organisasi	Apabila ada perubahan, Jakarta	Hardcopy	1 tahun	
11	Seluruh Unit Organisasi	Informasi statistik organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan	Masing-masing unit organisasi	Masing-masing unit organisasi	Setiap tahun, Jakarta	Hardcopy / Softcopy	5 tahun	
12	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang tata cara/prosedur pelayanan publik	Unit organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik	Unit organisasi yang memiliki fungsi pelayanan publik	Apabila ada perubahan, Jakarta	Hardcopy/ Softcopy	Selama masa berlaku	
13	Seluruh Unit organisasi	Daftar dan dokumen Kesepakatan Bersama/MoU	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Waktu dan tempat menyesuaikan kesepakatan tersebut	Hardcopy	Selama masa kesepakatan/MoU berlaku	
14	Seluruh Unit organisasi	Profil infrastruktur bidang PUPR	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Menyesuaikan dengan lokasi infrastruktur	Softcopy/ Hardcopy	Sepanjang infrastruktur masih berfungsi	
15	Seluruh Unit organisasi	Laporan Barang Milik Negara	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	5 tahun	
16	Seluruh Unit organisasi	Standar Operasional Prosedur kerja lingkup Kementerian PUPR	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Seluruh Unit es 2/ Satuan Kerja	Setiap tahun, Tempat menyesuaikan	Softcopy/ Hardcopy	Selama masa berlaku	

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala  
di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PI

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KHUSUS</b>								
<b>Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA</b>								
17	<b>DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>	Pipeline proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bidang infrastruktur PUPR	Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP	Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP	Setiap ada perubahan, Jakarta	Hardcopy, Softcopy	5 tahun	
18		Profil proyek KPBU seluruh sektor, meliputi: - Penanggung Jawab Proyek - Skema Kerja Sama - Masa Kerja Sama - Pengembalian Investasi - IRR - NPV - Struktur Proyek - Timeline pelaksanaan proyek	Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP	Direktorat PPISDA, PPIJJ, PPIP, PPP	Setiap ada perubahan, Jakarta	Hardcopy, Softcopy	6 tahun	
19		Informasi Umum, Mekanisme Kemudahan, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 tahun	
20		Data Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dilakukan perbaharuan data minimal seminggu sekali	Softcopy	Sampai terbit laporan realisasi berikutnya	
21		Data Realisasi Subsidi Bunga Kredit Perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Satuan Kerja Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dilakukan perbaharuan data minimal seminggu sekali	Softcopy	Sampai terbit laporan realisasi berikutnya	

Informasi yang wajib tersedia setiap saat  
di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PI

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KHUSUS</b>								
<b>Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT</b>								
22	<b>DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>	Informasi Publik terkait Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) - Nama Pengembang Perumahan - Asosiasi tempat Pengembang Perumahan tersebut bernaung - Alamat Pengembang Perumahan - Status Pengembang Perumahan (Terdaftar/Tidak Terdaftar di SIRENG)	Direktorat PSSPP	Subdirektorat Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan	Perbaharuan data setiap saat di aplikasi	Tampilan data Pengembang di aplikasi SIRENG	Per Tahun	
23		Informasi Publik Simpul KPBU - Jumlah Data Proyek KPBU meliputi Penyiapan s/d Konstruksi dan Operasi - Informasi terkait profil proyek KPBU beserta data teknisnya	Direktorat PSSPP	Subdirektorat Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan dan Subdirektorat Kepatuhan Intern	Perbaharuan data setiap saat di aplikasi	Informasi dan Data Teknis yang ditampilkan di Website SIMPUL KPBU	Per Tahun	

## 2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) terus berupaya menciptakan dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga output akhirnya dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan menyediakan Layanan Informasi Publik secara langsung yang berada di kantor DJPI dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, dan pelayanan konsultasi.

Unit Layanan Informasi Publik nantinya bermanfaat dalam memberikan dan membantu para pemohon atau pihak-pihak berkepentingan dalam mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dan profesional.



Gambar Booth Pelayanan Informasi

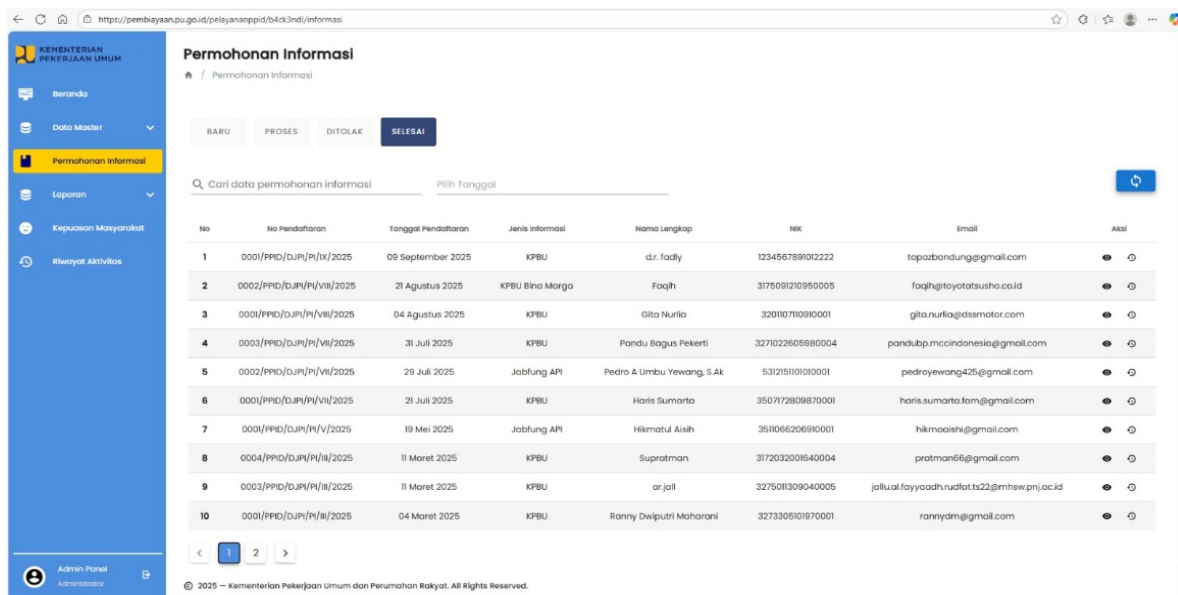
Booth layanan informasi publik DJPI telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa **televisi interaktif** yang digunakan sebagai **media penyampaian informasi kepada masyarakat**. Melalui TV tersebut, pengunjung dapat memperoleh berbagai penjelasan mengenai program, kegiatan, kebijakan, serta capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) secara visual dan menarik.



## 2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi publik DJPI berinovasi dengan membuat suatu sistem penanganan pengaduan terpadu yang melibatkan PIC disetiap unit kerja melalui PPID DJPI:

<https://pembiayaan.pu.go.id/pelayanppid/b4ck3nd!>



The screenshot displays the 'Permohonan Informasi' (Information Request) dashboard. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Beranda', 'Data Master', 'Permohonan Informasi', 'Laporan', 'Keputusan Masyarakat', and 'Riwayat Aktivitas'. The main content area shows a table of information requests with columns for No, No Pendaftaran, Tanggal Pendaftaran, Jenis Informasi, Nama Lengkap, NIK, Email, and Aksi. The table lists 10 requests, with details such as the date of registration and the type of information requested.

No	No Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran	Jenis Informasi	Nama Lengkap	NIK	Email	Aksi
1	0001/PPID/DJPI/PN/IX/2025	09 September 2025	KPBU	dr. fady	123456789012222	topazbandung@gmail.com	• 🔗
2	0002/PPID/DJPI/PN/VIII/2025	21 Agustus 2025	KPBU Bina Marga	Faqih	3175091210950005	faqih@toyotatsusho.co.id	• 🔗
3	0001/PPID/DJPI/PN/VIII/2025	04 Agustus 2025	KPBU	Gita Nurika	320107101090001	gita.nurika@dsrmotor.com	• 🔗
4	0003/PPID/DJPI/PN/VI/2025	31 Juli 2025	KPBU	Pandu Bagus Peikerti	3271022605680004	pandubp.mccindonesia@gmail.com	• 🔗
5	0002/PPID/DJPI/PN/VI/2025	29 Juli 2025	Jobfung API	Pedro A Uribu Yewang, S.Ak	531215101010001	pedroyewang425@gmail.com	• 🔗
6	0001/PPID/DJPI/PN/VI/2025	21 Juli 2025	KPBU	Haris Sumarta	3507172809870001	haris.sumarta.fom@gmail.com	• 🔗
7	0001/PPID/DJPI/PN/V/2025	19 Mei 2025	Jobfung API	Hikmatul Alish	351066206910001	hikmatulish@gmail.com	• 🔗
8	0004/PPID/DJPI/PN/II/2025	11 Maret 2025	KPBU	Supratman	3172032001640004	pratman6@gmail.com	• 🔗
9	0003/PPID/DJPI/PN/II/2025	11 Maret 2025	KPBU	ar.joli	3275011309040005	jaliul.fayyazh.rudfat.ts22@mhaw.pnj.ac.id	• 🔗
10	0001/PPID/DJPI/PN/II/2025	04 Maret 2025	KPBU	Ronny Dwi Putri Maharani	3273305101970001	ronnydm@gmail.com	• 🔗

### *Dashboar* Pengaduan

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, telah dilakukan serangkaian perubahan dan perbaikan sistematis. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

#### 1. Digitalisasi Rekapitulasi Data

Sebelumnya, rekapitulasi data pemohon beserta dokumen pendukung masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidakteraturan data. Kini, seluruh data telah terdokumentasi secara digital dalam *dashboard layanan*, sehingga memudahkan pelacakan dan pengarsipan informasi.

#### 2. Integrasi Layanan Pengaduan dan Permohonan Informasi

Sebelumnya, penanganan pengaduan dan permohonan informasi dilakukan secara terpisah dari berbagai kanal. Kini, layanan tersebut telah terintegrasi melalui satu *dashboard layanan*, yang memungkinkan penanganan lebih cepat, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik.

### 3. Pemantauan Batas Waktu Layanan

Pada tahap awal, monitoring terhadap batas waktu pelayanan dilakukan secara manual. Kini, setiap pengaduan dan permohonan informasi sudah termonitor otomatis melalui *dashboard pengaduan*, sehingga meminimalkan potensi keterlambatan.

### 4. Penetapan Penanggung Jawab (PIC)

Dahulu belum terdapat penanggung jawab yang jelas dari setiap unit kerja terkait pengelolaan pengaduan dan permohonan informasi. Saat ini telah dibentuk *Penanggung Jawab (PIC)* di masing-masing unit kerja melalui **SK PIC Penanganan Pengaduan**, untuk memastikan tanggung jawab dan tindak lanjut berjalan efektif.

### 5. Penyusunan Tata Kelola dan SOP

Sebelumnya belum tersedia tata kelola yang terintegrasi dalam penanganan pengaduan masyarakat. Kini, telah disusun **Proses Bisnis dan SOP Penanganan Pengaduan DJPI**, yang menjadi pedoman baku dalam pelaksanaan layanan tersebut.

### 6. Peningkatan Transparansi Informasi

Sebelumnya, informasi terkait penanganan pengaduan dan permohonan informasi belum disampaikan secara transparan. Saat ini, sistem yang diterapkan memungkinkan penyajian informasi yang lebih terbuka kepada publik, sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan publik.

## 2.7 Survei Layanan Informasi Publik

Pada Laporan Semester I Tahun 2025 setelah permohonan dapat diproses telah dilakukan survey melalui form yang dikirimkan langsung kepada pemohon untuk mempermudah melakukan penilaian sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan DJPI. Penilaian ini berdasarkan penilaian terhadap 9 unsur penilaian antara lain:

1. Unsur tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya,
2. Unsur tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini,
3. Unsur tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan,
4. Unsur tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan,
5. Unsur tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan,
6. Unsur tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan,
7. Unsur tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan,
8. Unsur tentang kualitas sarana dan prasarana
9. Unsur tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. Yang menjadi acuan dalam standar layanan informasi publik di DJPI

1	Unsur	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
2	Total Nilai Persepsi	79	79	80	81	81	80	82	80	85
3	IKM	3.29	3.29	3.33	3.38	3.38	3.33	3.42	3.33	3.54
4	Konversi Nilai IKM	82.29	82.29	83.33	84.38	84.38	83.33	85.42	83.33	88.54
5	Mutu Pelayanan	B	B	B	B	B	B	B	B	A
6	Kinerja Unit Pelayanan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
7										
8	NILAI SKM UPT	84.1435185								
9	MUTU PELAYANAN	B								
10	KINERJA UNIT PELAYANAN	Baik								
11										
12	Keterangan									
13	U1	Unsur tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya								
14	U2	Unsur tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini								
15	U3	Unsur tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan								
16	U4	Unsur tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan								
17	U5	Unsur tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan								
18	U6	Unsur tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan								
19	U7	Unsur tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan								
20	U8	Unsur tentang kualitas sarana dan prasarana								
21	U9	Unsur tentang penanganan pengaduan pengguna layanan								

### *Perhitungan SKM*

Berdasarkan data Indeks Kepuasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik DJPI pada Semester I hal ini masyarakat memberikan penilaian terhadap layanan informasi publik dengan nilai **BAIK** dengan mutu pelayanan B.

### **BAB III**

#### **KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI**

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan DJPI pada prinsipnya telah berjalan, namun masih terdapat berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut atas Kendala tersebut antara lain:

##### **3.1 Kendala Layanan Informasi Lingkup Unit Organisasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum**

Sebagai badan publik yang memiliki tugas dan fungsi dapat menyelenggarakan pelayanan informasi dengan baik. Namun sebagai unit organisasi dengan tugas menangani:

1. Keterbatasan Sumber Daya dalam Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi Publik, Beberapa unit kerja masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang secara khusus menangani layanan informasi publik, sehingga proses pembaruan informasi tidak dapat dilakukan secara optimal.
2. Belum Optimalnya Evaluasi dan Monitoring Kinerja Layanan Informasi, Mekanisme evaluasi terhadap efektivitas layanan informasi (termasuk respon terhadap permohonan informasi, kepuasan publik, dan kinerja PPID) belum dilaksanakan secara berkala.

##### **3.2 Kendala dalam Layanan Informasi Lingkup Unit Kerja**

1. Belum Seragamnya Standar dan Format Informasi Antar Unit Kerja, Setiap unit kerja memiliki format penyajian dan tata cara publikasi informasi yang berbeda, baik dari sisi konten, tampilan, maupun media yang digunakan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Masih Terbatas, Sistem digitalisasi informasi publik belum sepenuhnya berjalan optimal di setiap unit kerja. Sebagian besar proses dokumentasi dan pelayanan informasi masih dilakukan secara manual.



## **BAB IV**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI**

Dalam rangka peningkatan layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dapat melaksanakan rekomendasi dan tindaklanjut antara lain:

#### **4.1 Rekomendasi**

1. Penguatan Kapasitas dan Penugasan Khusus SDM Pengelola Informasi Publik, Melakukan penunjukan resmi petugas pengelola informasi publik (PPID Pelaksana Unit Kerja) di setiap Unit Kerja.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Data, Mengembangkan Dashboard layanan informasi digital DJPI yang terintegrasi, responsif, dan mudah diakses oleh publik.
3. Peningkatan Sosialisasi dan Publikasi Layanan Informasi Publik, Melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin mengenai hak akses informasi publik, mekanisme permohonan informasi, serta kanal resmi layanan informasi DJPI.
4. Penguatan Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Unit, Mendorong sinergi antar unit kerja dalam pengelolaan dan penyebaran informasi publik agar tercipta layanan informasi yang komprehensif dan konsisten.

#### **4.2 Tindak Lanjut**

1. Sudah dilakukan pemutakhiran DIK dan DIP secara berkala serta melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dengan struktur organisasi terbaru berkoordinasi dengan Biro Komunikasi Publik.
2. Sudah di susunnya Standar layanan informasi publik yang terintegrasi antar unit kerja serta mengembangkan sistem digital terpadu untuk pengelolaan informasi melalui dashboard layanan dan website DJPI.
3. Menetapkan surat tugas dan uraian tugas bagi anggota sekretariat pelaksana PPID dari tiap unit kerja guna memperjelas tanggung jawab dan peran.
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pelatihan rutin untuk memastikan konsistensi penerapan SOP dan peningkatan kompetensi petugas layanan informasi publik.
5. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta komitmen unit kerja terhadap keterbukaan informasi publik.